

BAB I

PENDAHULUAN

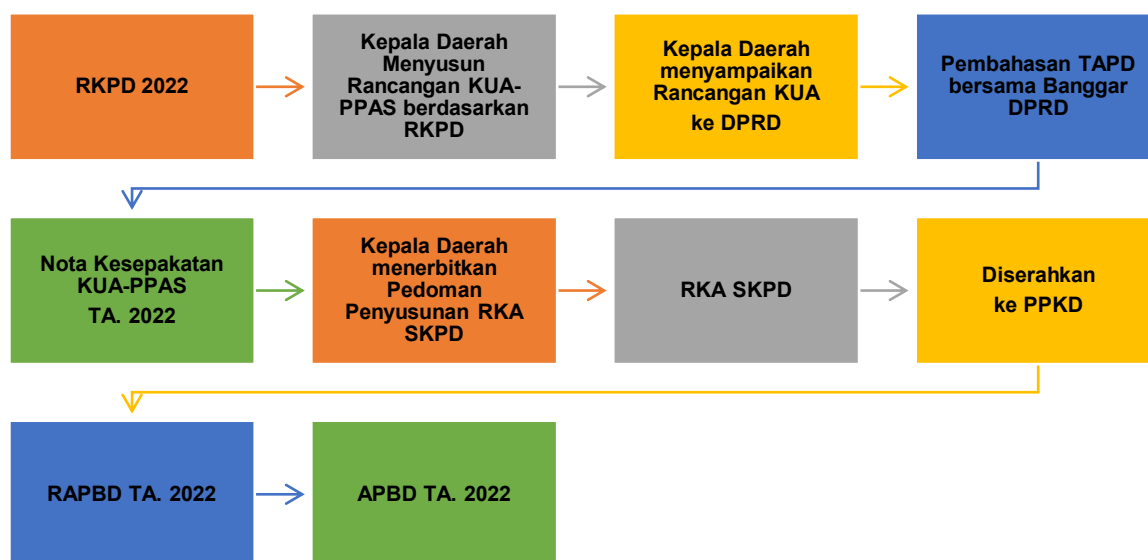
A. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 merupakan periode pertama perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021. Secara substansi penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RKP tahun 2022. Dalam rangka sinkronisasi pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun RKPD Tahun 2022 telah melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 juga telah memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2022, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan stakeholder terkait.

Tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah tahap penganggaran melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah RKPD ditetapkan kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun;
- 3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

B. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Menentukan prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

C. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 560);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 564);
35. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 565);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026;
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2021 (APBD) (Rp)	Tahun 2022 R-APBD	Selisih Bertambah/(Kurang)	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
4 PENDAPATAN DAERAH	3.701.942.728.300	3.480.323.080.509	(221.619.647.791)	-5,99%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.352.645.560.200	1.348.493.617.641	(4.151.942.559)	-0,31%
4.1.1 A PENDAPATAN PAJAK DAERAH	981.727.516.200	1.150.224.138.161	168.496.621.961	17,16%
Pajak Kendaraan Bermotor	355.500.000.000	425.534.000.000	70.034.000.000	19,70%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	205.500.000.000	221.186.000.000	15.686.000.000	7,63%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	294.000.000.000	359.315.036.467	65.315.036.467	22,22%
Pajak Air Permukaan (PAP)	950.000.000	1.000.000.000	50.000.000	5,26%
Pajak Rokok	125.777.516.200	143.189.101.694	17.411.585.494	13,84%
			-	
4.1.2 B HASIL RETRIBUSI DAERAH	216.248.444.000	69.994.479.480	(146.253.964.520)	-67,63%
Retribusi Jasa Usaha	213.848.444.000	60.262.979.480	(153.585.464.520)	-71,82%
Retribusi Laboratorium - Keswan	250.000.000	367.035.480	117.035.480	46,81%
Retribusi - BLK Disnaker	88.000.000	4.000.000	(84.000.000)	-95,45%
Retribusi - Asrama Haji (BPKAD)	1.000.000.000	1.050.000.000	50.000.000	5,00%
Retribusi - Laboratorium DKP & BBI	425.000.000	446.500.000	21.500.000	5,06%
Retribusi Kepelabuhan (DKP Antang)	500.000.000	700.000.000	200.000.000	40,00%
Retribusi - Laboratorium PU	160.000.000	300.000.000	140.000.000	87,50%
Retribusi Jasa Kepelabuhan (Dishub)	1.000.000.000	56.470.000.000	55.470.000.000	5547,00%
Retribusi Kepelabuhan Labuh Jangkar	200.000.000.000	-	(200.000.000.000)	-100,00%
Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut (DKP)	10.000.000.000	500.000.000	(9.500.000.000)	-95,00%
Retribusi - Pemakaian Ruang dan ATM	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
Retribusi - sewa menara telekom	225.444.000	225.444.000	-	0,00%
Retribusi Perizinan Tertentu	2.400.000.000	9.731.500.000	7.331.500.000	305,48%
Pemberian Perpanjangan (IMTA)	400.000.000	8.000.000.000	7.600.000.000	1900,00%
Retribusi Izin Usaha Perikanan (DKP)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Retribusi Izin Bidang Perhubungan	1.000.000.000	731.500.000	(268.500.000)	-26,85%
			-	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2021 (APBD) (Rp)	Tahun 2022 R-APBD	Selisih Bertambah/(Kurang)	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 4.1.3 C DIPISAHKAN	53.150.000.000	9.150.000.000	(44.000.000.000)	-82,78%
Bagian Laba Penyertaan Modal PT. Bank Riau Kepri	3.150.000.000	3.150.000.000	-	0,00%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)	50.000.000.000	6.000.000.000	(44.000.000.000)	-88,00%
4.1.4 D LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	101.519.600.000	119.125.000.000	17.605.400.000	17,34%
Penerimaan Jasa Giro	11.000.000.000	11.550.000.000	550.000.000	5,00%
Jasa Giro Kas Daerah	11.000.000.000	11.550.000.000	550.000.000	5,00%
Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	5.019.600.000	15.075.000.000	10.055.400.000	200,32%
Pendapatan Denda BBN-KB	19.600.000	60.000.000	40.400.000	206,12%
Pendapatan Denda PKB	5.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	200,00%
Pendapatan Denda PBB-KB	-	10.000.000	10.000.000	
Pendapatan Denda P-AP	-	5.000.000	5.000.000	
Pendapatan Jasa Layanan (BLUD)	83.500.000.000	92.500.000.000	9.000.000.000	10,78%
RSUD Engku Haji Daud	13.500.000.000	17.500.000.000	4.000.000.000	29,63%
RSUD Raja Ahmad Tabib	70.000.000.000	75.000.000.000	5.000.000.000	7,14%
Penerimaan Lain-lain	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	-100,00%
Bagi hasil kerjasama MV. lintas kepri	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	-100,00%
Bagi hasil kerjasama Bis Pekerja			-	
4.2 PENDAPATAN TRANSFER	2.348.013.168.100	2.130.568.412.868	(217.444.755.232)	-9,26%
DANA PERIMBANGAN	2.303.575.846.100	2.109.830.933.868	(193.744.912.232)	-8,41%
A DANA TRANSFER UMUM	1.459.683.105.100	1.678.234.754.868	218.551.649.768	14,97%
4.2.1 DANA BAGI HASIL (DBH)	330.591.759.100	585.305.215.868	254.713.456.768	77,05%
Bagi Hasil Pajak	141.830.268.000	248.086.356.000	106.256.088.000	74,92%
Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan	13.492.166.400	39.410.110.000	25.917.943.600	192,10%
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	128.206.936.800	208.616.298.000	80.409.361.200	62,72%
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	131.164.800	59.948.000	(71.216.800)	-54,30%
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	188.761.491.100	337.218.859.868	148.457.368.768	78,65%
Bagi Hasil dari Provisi SDA Hutan	559.672.000	355.579.000	(204.093.000)	-36,47%
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	4.800.933.600	4.918.668.000	117.734.400	2,45%
Bagi Hasil dari Minyak Bumi dan Gas Bumi	183.400.885.500	331.944.612.868	148.543.727.368	80,99%
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.129.091.346.000	1.092.929.539.000	(36.161.807.000)	-3,20%
4.2.3 B DANA TRANSFER KHUSUS	843.892.741.000	431.596.179.000	(412.296.562.000)	-48,86%
DAK Fisik	195.771.881.000	166.731.531.000	(29.040.350.000)	-14,83%
DAK Reguler	137.824.007.000	145.861.431.000	8.037.424.000	5,83%
DAK Reguler - Pendidikan	102.079.565.000	129.489.035.000	27.409.470.000	
-SMA	55.685.079.000	60.199.757.000	4.514.678.000	
-SMK	43.500.896.000	65.005.007.000		
-SDLB/SMPLB/SMLB/SLB	1.993.590.000	4.284.271.000		
-Pendidikan (Perpustakaan Daerah)	900.000.000	-		
DAK Reguler - Kesehatan	3.286.494.000	8.430.867.000	5.144.373.000	
-Penguatan percepatan penurunan stunting		5.245.339.000	5.245.339.000	
-Kefarmasian		3.185.528.000	3.185.528.000	
DAK Reguler - Jalan	12.860.940.000	7.941.529.000	(4.919.411.000)	
DAK Reguler - Transportasi Laut	19.597.008.000	-	(19.597.008.000)	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2021 (APBD) (Rp)	Tahun 2022 R-APBD	Selisih Bertambah/(Kurang)	%
DAK Afirmasi	-	-		
DAK Fisik Penugasan	57.947.874.000	20.870.100.000	(37.077.774.000)	-63,98%
Bidang Jalan (Tematik Penguatan destinasi pariwisata dan sentra UKM)		10.709.337.000		
Bidang Jalan (Tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewan		10.160.763.000		
DAK Non Fisik	648.120.860.000	264.864.648.000	(383.256.212.000)	-59,13%
Bantuan Dana Operasioan Sekolah (BOS)	565.930.240.000	182.666.180.000	(383.264.060.000)	-67,72%
Dana BOS Reguler	557.890.240.000	180.788.680.000	(377.101.560.000)	-67,59%
Dana BOS Afirmasi	4.140.000.000	-	(4.140.000.000)	-100,00%
Dana BOS Kinerja	3.900.000.000	1.877.500.000	(2.022.500.000)	-51,86%
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	71.792.970.000	70.938.383.000	(854.587.000)	-1,19%
Dana Tambahan Penghasilan Guru	600.000.000	2.562.000.000	1.962.000.000	327,00%
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	-	2.328.451.000	2.328.451.000	
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.352.080.000	2.419.964.000	67.884.000	2,89%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan & Bantuan Ops KB	4.619.399.000	2.521.840.000	(2.097.559.000)	-45,41%
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.096.279.000	-	(1.096.279.000)	-100,00%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	334.212.000	451.800.000	117.588.000	35,18%
Dana Pelayanan Kepariwisataaan	862.578.000	-	(862.578.000)	-100,00%
Dana Fasilitas Penanaman Modal	533.102.000	976.030.000	442.928.000	83,09%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	
DANA INSENTIF DAERAH (D.I.D)	44.437.322.000	20.737.479.000	(23.699.843.000)	-53,33%
4.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.284.000.000	1.261.050.000	(22.950.000)	-1,79%
A HIBAH PT. JASA RAHARJA (OPERASIONAL SAMSAT	1.284.000.000	1.261.050.000	(22.950.000)	-1,79%
	-	-		
B PENGEMBALIAN HIBAH BAWASLU DAN KPU				

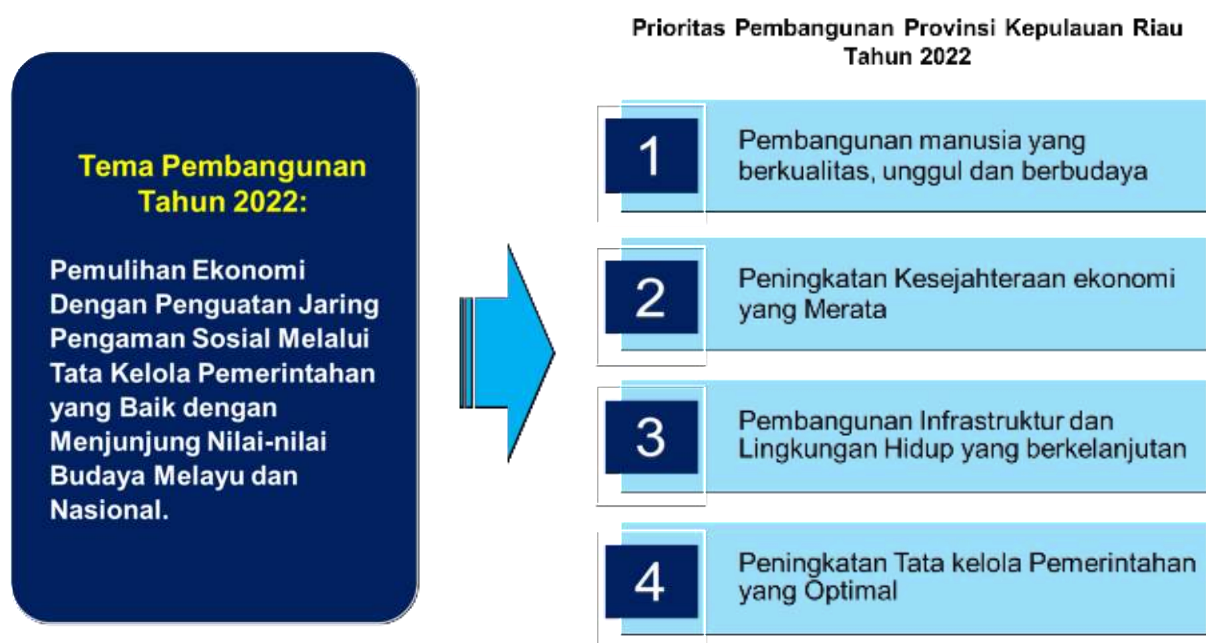
BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 yaitu: “Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.” Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang Merata
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal



Gambar 3.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022 dengan Misi RPJMD Tahun Tahun 2021-2026 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

Keterkaitan Prioritas pembangunan Provinsi Kepri Tahun 2022 dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 3.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

Sinergitas program pemerintah provinsi terhadap prioritas pembangunan nasional tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.199.276.856
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	648.754.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	971.460.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.742.235.380
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.254.924.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.740.000.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.849.448.633
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	449.997.660

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.500.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.350.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.170.000.000
			Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	100.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	10.330.000.000
			Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.940.000.000
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.940.000.000
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.940.000.000

No	Prioritas Pembanguna n Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	500.000.000
			Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	633.000.000
			Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	200.000.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	304.692.820
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.220.480.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	1.850.000.000
			Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	
			Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	9.236.992.192
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Dinas Pariwisata	284.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Pembanguna n Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Dinas Pariwisata	500.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.000.000
			Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	28.215.000
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Rasio Elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	501.807.940

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	3.480.853.200
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	
			Persentase sarana - prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Dinas Sosial	
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.698.474.096
			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	1.972.626.600

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
			Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Dinas Kesehatan	47.914.465.366
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	
			Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan	
			Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan	
			Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
			Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	
			Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	
			Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Dinas Kesehatan	
			Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	153.000.000
			Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan	1.680.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	750.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	51.461.311.500
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.318.000.000
			Cakupan pembinaan atlet muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional yang memperoleh medali emas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.000.000
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	2.540.946.192
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (lebih ke Indikator sasaran strategis)	Dinas Kebudayaan	682.871.984
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	Dinas Kebudayaan	3.883.167.984

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	967.462.192
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	Dinas Kebudayaan	683.168.384
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	660.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.500.000.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	559.967.800
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	194.079.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	144.865.300

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
5	Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	60.445.624.496
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	Dinas Perhubungan	1.658.410.982
			Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	150.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Dinas Perhubungan	70.592.421.405
			Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	
			Persentase Meningkatnya Layanan Pelayaran	Dinas Perhubungan	
			Persentase Meningkatnya Layanan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	
			Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi dan dalam Kondisi baik	Dinas Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat (AKDP dan Angkutan Perkotaan)	Dinas Perhubungan	6.633.643.928
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250.000.000
			Indeks Kualitas Air Laut	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Indeks Kualitas Udara Ambien	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	150.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Target Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000
			Target Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	283.369.900
			Rehabilitasi Lahan Kritis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	283.369.900

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.083.578.968
			Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Pengembangan Sistem Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Kabupaten/Kota yang menggunakan database konsolidasi bersih dari kemendagri sebagai data dasar pelayanan reguler administrasi kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.578.322.298
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Sekretariat Daerah	227.387.116.360
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	Sekretariat Daerah	3.270.000.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Sekretariat Daerah	3.472.673.100
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sekretariat Daerah	1.752.607.500

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	213.929.106.000
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang tepat waktu dan akurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.811.714.832.018
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Bersertipikat (Tanah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.938.378.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	344.988.600
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	Sekretariat Daerah	89.999.900
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Perlindungan dan Pelayanan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	699.804.500
			Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.085.399.300
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	---	Sekretariat Daerah	1.133.030.800
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	---	Sekretariat Daerah	645.857.168

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Dinas Kesehatan	47.914.465.366	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan		
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan		
				Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan		
				Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Dinas Kesehatan		
				Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan		
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Dinas Kesehatan		
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Dinas Kesehatan		
				Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Dinas Kesehatan		
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Dinas Kesehatan		
				Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan		
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan		
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan		
				Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan		
				Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan		
				Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan		
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Dinas Kesehatan		
				Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	153.000.000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan		
				Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Dinas Kesehatan		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan	1.680.000.000	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	51.461.311.500	
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan		
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan		
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan		
				Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan		
		Menurunnya angka kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	3.480.853.200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial		
				Persentase sarana - prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Dinas Sosial		
				Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.698.474.096	
				Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlanter yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	1.972.626.600	
				Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial		
				Persentase penyandang disabilitas terlanter yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	Dinas Sosial	3.430.393.692	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Dinas Sosial		
		Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kebudayaan	28.413.996.628	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	2.540.946.192	
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (lebih ke Indikator sasaran strategis)	Dinas Kebudayaan	682.871.984	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	Dinas Kebudayaan	3.883.167.984	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	967.462.192	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	Dinas Kebudayaan	683.168.384	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	750.000.000	
2	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	971.460.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.742.235.380	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.254.924.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.740.000.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.849.448.633	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	449.997.660	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standaar pada saat dilakukan Pengawasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.500.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.350.000.000	
		Terwujudnya Penciptaan Lapangan Kerja Baru dan Peningkatan Investasi	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.220.480.000	
		Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.170.000.000	
				Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	100.000.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	200.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	10.330.000.000	
				Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.940.000.000	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.940.000.000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.940.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	500.000.000	
				Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	633.000.000	
				Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	1.040.254.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola	Dinas Sosial	306.500.000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Optimalisasi Sektor Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.199.276.856	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	648.754.400	
		Terwujudnya Peningkatan sektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	1.850.000.000	
				Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata		
				Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	9.236.992.192	
				Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Dinas Pariwisata	284.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Dinas Pariwisata	500.000.000	
3	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pembanguna n Antar Pulau dan Pesisir	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat (AKDP dan Angkutan Perkotaan)	Dinas Perhubungan	6.633.643.928	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	Dinas Perhubungan	1.658.410.982	
				Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan		
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Dinas Perhubungan	70.592.421.405	
				Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan		
				Persentase Meningkatnya Layanan Pelayaran	Dinas Perhubungan		
				Persentase Meningkatnya Layanan Penyeberangan	Dinas Perhubungan		
				Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi dan dalam Kondisi baik	Dinas Perhubungan		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	150.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	60.445.624.496	
		Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250.000.000	
				Indeks Kualitas Air Laut	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
				Indeks Kualitas Udara Ambien	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	150.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Target Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000	
				Target Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
		Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	283.369.900	
				Rehabilitasi Lahan Kritis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	283.369.900	
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	Sekretariat Daerah	3.270.000.000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Sekretariat Daerah	3.472.673.100	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sekretariat Daerah	1.752.607.500	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	213.929.106.000	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang tepat waktu dan akurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.811.714.832.018	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Bersertipikat (Tanah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.938.378.000	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Sekretariat Daerah	227.387.116.360	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	Sekretariat Daerah	89.999.900	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	---	Sekretariat Daerah	1.133.030.800	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	---	Sekretariat Daerah	645.857.168	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terwujudnya Managemen ASN yang Profesional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Perlindungan dan Pelayanan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	699.804.500	
				Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.085.399.300	
		Terwujudnya Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.083.578.968	
				Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Pengembangan Sistem Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	660.000.000	

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program, kegiatan dan sub kegiatan tercantum pada Tabel 3.4 sebagaimana terlampir.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan bagian dari APBD salah satunya digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan juga urusan penunjang pemerintahan.

Plafon anggaran sementara untuk masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 4.1. (terlampir).

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	822.832.494.411	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	822.832.494.411	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	820.358.714.361	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	473.515.594.346	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.255.553.482	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	905.296.073	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000.000	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	225.257.409	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	402.929.021.934	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	400.692.821.754	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.550.800.180	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	675.200.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.200.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	276.400.000	
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	276.400.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	572.655.000	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	537.530.000	
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.125.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.589.528.500	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.158.000	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	568.304.000	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.701.700	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.059.293.700	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.904.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89.640.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.977.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.991.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.179.100	
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	502.380.000	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.460.200	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.960.200	
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.500.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.569.693.867	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.078.536.390	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.388.657.477	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.942.281.363	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.326.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.944.352	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.461.011.011	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	345.855.270.815	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	181.321.706.789	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	15.272.012.090	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.219.925.000	
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2.329.378.000	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	7.799.030.000	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	5.372.730.000	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	3.410.536.000	
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.067.531.000	
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.883.097.000	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.632.856.284	
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	4.236.129.000	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.598.297.000	
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.547.145.000	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	582.610.000	
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	582.610.000	
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	362.366.000	
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	362.366.000	
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	236.244.000	
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	233.376.000	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	2.065.616.000	
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	420.062.000	
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.255.000.000	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	12.000.000.000	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	275.000.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	349.982.200	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	82.952.000	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	320.000.000	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100.824.856.215	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	151.555.351.986	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	33.883.899.459	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	7.393.902.000	
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	973.516.000	
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.490.730.000	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.290.415.842	
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	902.455.000	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	4.767.218.700	
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	61.330.200	
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.500.000.000	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8.100.000.000	
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	374.930.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	353.895.000	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.000.000.000	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	74.063.059.785	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	12.978.212.040	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.184.000.000	
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	196.000.000	
1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	224.000.000	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.219.343.060	
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	468.000.000	
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	190.340.000	
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	128.497.800	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	306.454.500	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	283.312.680	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	7.778.264.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	39.808.000	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	19.904.000	
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	19.904.000	
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	19.904.000	
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	19.904.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	879.357.200	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	879.357.200	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	277.200.000	
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	602.157.200	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	68.684.000	
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	48.780.000	
1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	48.780.000	
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	19.904.000	
1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	19.904.000	
1.01.0.00.0.00.01.000 1	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.473.780.050	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.473.780.050	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.118.000	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.118.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.090.050	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.352.000	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.917.350	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.095.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.725.700	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.203.572.000	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.272.000	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.500.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.699.800.000	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	356.774.893.639	
1.02.0.00.0.00.02.000 0	Dinas Kesehatan	356.774.893.639	
1.02.0.00.0.00.02.000 0	Dinas Kesehatan	84.707.074.437	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.643.591.468	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	372.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.000.000	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	225.000.000	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.590.207.368	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.655.287.368	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	934.920.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	897.500.000	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.500.000	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	262.000.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.000.000	
1.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	342.884.100	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	66.504.700	
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.379.400	
1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.065.650.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.640.000	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.845.010.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.350.000	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.350.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.223.482.969	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	10.741.396.011	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.000.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.250.000.000	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.491.396.011	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	35.739.283.169	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	68.500.000	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.748.402.500	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	790.000.000	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	129.000.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.037.179.000	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.000.000	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	110.946.000	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	680.000.000	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	75.000.000	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	333.912.600	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	65.000.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	20.000.000	
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	20.000.000	
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1.300.000.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.291.343.069	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	320.507.217	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	320.507.217	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	422.296.572	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	370.000.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	52.296.572	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.980.000.000	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	13.440.000.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.440.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	540.000.000	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	430.000.000	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	110.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	20.000.000	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	20.000.000	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	20.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	840.000.000	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	825.000.000	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	825.000.000	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	15.000.000	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.000 2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	192.772.262.313	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	161.098.792.313	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.064.287.313	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.398.407.313	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.650.880.000	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15.000.000	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.672.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.672.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.114.848.000	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000.000	
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	739.848.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.498.431.200	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.874.446.200	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.503.985.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.553.800	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.553.800	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	75.000.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.641.480.000	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.255.628.000	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	135.600.000	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.000.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.500.000.000	
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	935.028.000	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	400.000.000	
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	500.000.000	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.785.000.000	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.198.840.000	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.501.840.000	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.697.000.000	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100.000.000	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	87.012.000	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	87.012.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.031.990.000	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	15.563.990.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.563.990.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	468.000.000	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	285.260.000	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	182.740.000	
1.02.0.00.0.00.02.0003	Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud	79.295.556.889	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.551.498.228	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.105.100	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.105.100	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.369.206.890	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.788.410.890	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	530.796.000	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.325.300	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.991.300	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.334.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.605.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.605.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.006.196.019	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.685.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.065.400	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000	
1.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	43.120.000	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.149.633.719	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.691.900	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	17.501.059.919	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.501.059.919	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.652.881.500	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.053.221.900	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	154.002.800	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	125.991.000	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	281.325.600	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	1.295.353.000	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.196.549.500	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	528.130.600	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	528.130.600	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	71.529.000	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	71.529.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	17.091.177.161	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	17.014.677.161	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.014.677.161	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	76.500.000	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	76.500.000	
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	460.710.277.259	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	460.710.277.259	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	449.456.191.943	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.309.587.737	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	530.274.340	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.608.500	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.205.000	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.803.300	
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.438.100	
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	265,200	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	333.606.300	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.347.940	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.850.546.947	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.949.064.307	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.815.128.000	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	86.354.640	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.000.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.408.739.594	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.907.710	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.001.400	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.009.500	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.537.500	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.667.542	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.940.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	735.675.942	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.599.070	
1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
1.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	407.599.070	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.865.260.786	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.280.200	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	462.040.500	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.390.940.086	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.167.000	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.465.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.702.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.581.564.095	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.581.564.095	
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	950.000.000	
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.081.979.360	
1.03.02.1.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	1.280.000.000	
1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	7.598.867.700	
1.03.02.1.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.750.000.000	
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.671.564.095	
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	249.152.940	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.602.441.990	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.602.441.990	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	902.441.990	
1.03.03.1.01.06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	1.600.000.000	
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	100.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	150.000.000	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	150.000.000	
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	150.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	600.000.000	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	600.000.000	
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	600.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.585.509.109	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.585.509.109	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.585.509.109	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	22.138.625.464	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.138.625.464	
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	22.138.625.464	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	272.605.226.500	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	272.605.226.500	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.829.983.096	
1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.966.474.096	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.960.852.537	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	132.357.319.289	
1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.610.324.096	
1.03.10.1.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	11.177.918.096	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	2.541.474.096	
1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.317.631.096	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.316.657.096	
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	16.903.967.918	
1.03.10.1.01.13	Pembangunan Flyover	60.445.624.496	
1.03.10.1.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	3.759.696.096	
1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	12.650.000.000	
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	761.778.696	
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	8.005.525.796	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.400.000.000	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.500.000.000	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.044.000.000	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	256.000.000	
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200.000.000	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	500.000.000	
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	200.000.000	
1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	150.000.000	
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	150.000.000	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	400.000.000	
1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	300.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.483.237.048	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	200.000.000	
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	200.000.000	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	2.733.237.048	
1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	2.233.237.048	
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	500.000.000	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	250.000.000	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	250.000.000	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	300.000.000	
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000	
1.03.2.10.2.10.01.0001	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	8.621.885.316	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	522.395.936	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.533.600	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.217.600	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.719.000	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.200.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.355.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.042.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.659.336	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.659.336	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.203.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.003.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	794.422.484	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	794.422.484	
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	794.422.484	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	300.000.000	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	300.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	300.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.005.066.896	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	7.005.066.896	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	1.600.000.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.405.066.896	
1.03.2.10.2.10.01.000 2	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	2.632.200.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.632.200.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.644.700	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.265.200	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.161.000	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	138.900.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.319.000	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.397.825.300	
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000	
1.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	27.825.300	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.500.000	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.900.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.600.000	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.230.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	
1.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.230.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	208.319.785.949	
1.04.0.00.0.00.01.000 0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	208.319.785.949	
1.04.0.00.0.00.01.000 0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	208.319.785.949	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.509.756.488	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.787.058.640	
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.000.000	
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	77.762.000	
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	530.999.320	
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	101.253.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.724.000	
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	777.320.320	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.903.480.214	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.966.280.214	
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	937.200.000	
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	638.609.144	
1.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	163.200.000	
1.04.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	296.210.000	
1.04.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.488.000	
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.711.144	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.056.069.568	
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	217.452.000	
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	531.792.768	
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	
1.04.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75.554.400	
1.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.270.400	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.704.692.522	
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	210.437.500	
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.954.200	
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.198.000	
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	311.558.600	
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.194.800	
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.160.000	
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.732.000	
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.189.774.750	
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	169.075.144	
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	365.607.528	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	766.926.400	
1.04.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	115.866.000	
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	430.960.300	
1.04.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.100.100	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.800.000	
1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.700.000	
1.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.010.100.000	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.120.000	
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.560.000	
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.760.000	
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.800.000	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.000.000	
1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	150.000.000	
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	150.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.551.495.231	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.551.495.231	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.851.496.820	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.699.998.411	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	184.958.534.230	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	184.958.534.230	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	184.958.534.230	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	39.366.209.285	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	22.877.203.874	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	22.877.203.874	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.495.599.074	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166.232.060	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.912.540	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.319.520	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.803.380.674	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.353.380.674	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	450.000.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.854.340	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.141.240	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.001.000	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.340	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.995.000	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.360.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.356.760	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.962.732.000	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	238.142.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.840.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.573.750.000	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.400.000	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.400.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.731.604.800	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.029.287.500	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.278.073.200	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	264.517.300	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100.000.000	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1.000.000.000	
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	250.000.000	
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	36.697.000	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	349.517.300	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	264.517.300	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	85.000.000	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	352.800.000	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	352.800.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	650.000.000	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	650.000.000	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	100.000.000	
1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	150.000.000	
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	300.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		
1.05.04.1.01.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.489.005.411	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.489.005.411	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.405.426.443	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.327.279	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.332.400	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.113.879	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.881.000	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.528.057.411	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.161.115.411	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366.942.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.766.844	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.561.800	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.922.544	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.836.500	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.840.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.606.000	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.638.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.496.000	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.692.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	931.450.000	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.636.909	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.590.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	507.046.909	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.083.578.968	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	392.898.748	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	392.898.748	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	812.112.020	
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	258.635.000	
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	58.654.700	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	139.892.700	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	354.929.620	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6.828.568.200	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	6.470.540.000	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	358.028.200	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.000.000	
1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	50.000.000	
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.986.754.050	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	20.986.754.050	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	20.986.754.050	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.195.427.162	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.524.293	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.229.900	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56.100.470	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	216.131.896	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.062.027	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.303.659.858	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.738.627.858	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	565.032.000	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.440.000	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	58.440.000	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	842.507.200	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.800.000	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.960.281	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.200.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633.546.919	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.009.800	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.800.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.209.800	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.544.096	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.300.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	821.244.096	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.741.915	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.990.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.610.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.141.915	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.698.474.096	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.698.474.096	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	70.000.000	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	350.000.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.278.474.096	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.315.704.600	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	934.616.600	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	934.616.600	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	978.078.000	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	343.078.000	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	635.000.000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	140.000.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	140.000.000	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	30.810.000	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	30.810.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	232.200.000	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	125.000.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	107.200.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.430.393.692	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.430.393.692	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.362.682.548	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	397.711.144	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.670.000.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.040.254.500	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.040.254.500	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	441.216.000	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	275.184.000	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	323.854.500	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	306.500.000	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	306.500.000	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	306.500.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	31.736.829.585	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	31.736.829.585	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	27.420.521.569	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.041.021.569	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	
2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.305.179.585	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.571.259.585	
2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	733.920.000	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.200.000	
2.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.200.000	
2.07.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.405.384	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.000	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.999.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.425.384	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.720.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	483.272.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.687.600	
2.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	75.000.000	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.687.600	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.547.235.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439.985.000	
2.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.077.250.000	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.314.000	
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.530.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.784.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	50.000.000	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50.000.000	
2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.230.000.000	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.200.000.000	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.200.000.000	
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000	
2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	70.000.000	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	30.000.000	
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	30.000.000	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	40.000.000	
2.07.04.1.04.03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	40.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	449.500.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	216.190.400	
2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	196.190.400	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	233.309.600	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	95.304.200	
2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	138.005.400	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	580.000.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	580.000.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	310.000.000	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	190.000.000	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	80.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.000 1	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	3.697.932.000	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	177.932.000	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.722.000	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.931.200	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.063.200	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.727.600	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.110.000	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.100.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.300.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.800.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.520.000.000	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.520.000.000	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.520.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.3.32.0.00.02.000 2	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	81.318.400	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.318.400	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.721.500	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.352.600	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.760.900	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	856.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.752.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.574.000	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.574.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.022.900	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.822.900	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.200.000	
2.07.3.32.0.00.02.000 3	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	537.057.616	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	231.057.616	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.573.100	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.916.000	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.651.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.947.100	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.371.000	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.632.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.056.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.586.900	
2.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	4.338.400	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.248.500	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.369.616	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.257.616	
2.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.712.000	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.528.000	
2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.528.000	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	306.000.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	306.000.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	126.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	180.000.000	
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.603.674.702	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	19.603.674.702	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.799.657.422	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.740.816.411	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.841.664	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.841.664	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.311.806.119	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.685.706.119	
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	611.100.000	
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.440.000	
2.08.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	58.440.000	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.620.000	
2.08.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.620.000	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.577.100	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.524.000	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.569.500	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.679.800	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.656.300	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	221.412.500	
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.980.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.755.000	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.354.731.528	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.372.000	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.552.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.085.807.528	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.800.000	
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	183.290.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.750.000	
2.08.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.760.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.439.440.400	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	74.999.920	
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	74.999.920	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	980.000.060	
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	500.000.000	
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	480.000.060	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.384.440.420	
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	204.440.080	
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.180.000.340	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	511.955.900	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	159.999.900	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	159.999.900	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	181.956.000	
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	151.956.000	
2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.655.980.619	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.335.979.650	
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	480.000.000	
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	855.979.650	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	320.000.969	
2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	320.000.969	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	45.553.300	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	45.553.300	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	45.553.300	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.005.910.792	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	688.010.792	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	688.010.792	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	317.900.000	
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	67.900.000	
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	150.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	400.000.000	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	200.000.000	
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	200.000.000	
2.08.2.14.0.00.01.000 1	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.804.017.280	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.316.217.280	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.653.100	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.263.000	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.502.500	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.177.600	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.710.000	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.224.180	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.084	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	911.224.096	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.340.000	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.010.000	
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.330.000	
2.08.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	293.547.400	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	129.255.000	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	93.255.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	164.292.400	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	164.292.400	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	194.252.600	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	194.252.600	
2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	142.346.000	
2.08.07.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	51.906.600	
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	20.539.017.164	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	20.539.017.164	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	20.539.017.164	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.674.017.164	
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.409.232	
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.409.232	
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.808.869.500	
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.962.269.500	
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	846.600.000	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.950.000	
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.950.000	
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.103.808.432	
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.025.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.931.283.432	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.980.000	
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.980.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	615.000.000	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	350.000.000	
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100.000.000	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	130.000.000	
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.000.000	
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	30.000.000	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	135.000.000	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	135.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	50.000.000	
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	50.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	200.000.000	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	200.000.000	
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	283.237.048	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	283.237.048	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	283.237.048	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	283.237.048	
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	283.237.048	
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	283.237.048	
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	30.672.107.109	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.672.107.109	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.277.192.309	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.752.192.309	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.900.000	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.439.000	
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.461.000	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.075.299.009	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.723.667.009	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.351.632.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.680.300	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	660,000	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.575.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.048.300	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.290.000	
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.880.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.233.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.264.000	
2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.730.000	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.808.680.000	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.786.500.000	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.633.000	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.233.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.400.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	50.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	50.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200.000.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75.000.000	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	75.000.000	
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	75.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.000 1	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	394.914.800	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	300.000.000	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	94.914.800	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	94.914.800	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	94.914.800	
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	899.161.149	
2.12.2.13.0.00.02.000 0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.161.149	
2.12.2.13.0.00.02.000 0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.161.149	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	45.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	45.000.000	
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	45.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	65.000.000	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	65.000.000	
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	65.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	789.161.149	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	789.161.149	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	789.161.149	
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31.766.530.023	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.766.530.023	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.766.530.023	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.049.056.423	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.269.200	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.843.500	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.850.400	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.575.300	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.624.280.173	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.069.640.173	
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	554.640.000	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244.456.650	
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	147.530.000	
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.926.650	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	691.513.500	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.004.000	
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.800	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.826.800	
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.600.000	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.765.000	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.316.900	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.506.900	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.506.900	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.180.000	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.330.000	
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.082.350.000	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.850.000	
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.670.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.180.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	90.000.000	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.000.000	
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	90.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20.627.473.600	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.627.473.600	
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17.034.545.800	
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	250.000.000	
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	725.034.900	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	617.892.900	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	469.876.075	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	469.876.075	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	469.876.075	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	49.871.000	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	49.871.000	
2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	49.871.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	420.005.075	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	30.000.000	
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	30.000.000	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	390.005.075	
2.14.04.1.02.02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	169.999.425	
2.14.04.1.02.05	Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	220.005.650	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	88.939.096.619	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	88.939.096.619	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	86.779.096.619	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.688.264.232	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	448.780.900	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	148.335.500	
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.300.000	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.145.400	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.550.411.699	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.733.573.699	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	716.838.000	
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	
2.15.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	126.996.000	
2.15.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	76.996.000	
2.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.000.000	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	525.220.335	
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.800.000	
2.15.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90.880.335	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.540.000	
2.15.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	142.000.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.537.673.748	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.000	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.275.500	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.500.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.880.000	
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	135.300.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.723.248	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.484.350	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.484.350	
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.463.050.000	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.000.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.800.000	
2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.000.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.109.250.000	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.647.200	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	458.032.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.730.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.885.200	
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.658.410.982	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.359.471.982	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.200.000.000	
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	159.471.982	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	149.154.000	
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	75.000.000	
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	74.154.000	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	75.000.000	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	75.000.000	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.785.000	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	74.785.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	68.432.421.405	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	99.999.500	
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	99.999.500	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	9.170.005.000	
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	9.170.005.000	
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah	99.992.500	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan		
2.15.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	99.992.500	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100.001.500	
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100.001.500	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	58.962.422.905	
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.350.600.000	
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	52.161.822.905	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.450.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.000 1	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	300.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	300.000.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	300.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	300.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.000 2	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	440.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	440.000.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	440.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	440.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.000 3	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	800.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	800.000.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	800.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	800.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	380.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	380.000.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	380.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	380.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	240.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	240.000.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	240.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	240.000.000	
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.516.562.799	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.516.562.799	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.516.562.799	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.476.831.699	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.859.862.799	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.239.414.799	
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	620.448.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.020.000	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.020.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.542.900	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.721.800	
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.244.000	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.775.100	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.358.000	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.040.000	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.404.000	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.835.700.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.835.700.000	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.706.000	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.600.000	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.106.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.624.596.460	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.624.596.460	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	195.000.000	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	49.999.200	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	549.998.600	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	99.999.000	
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	54.999.900	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.074.599.760	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	500.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.415.134.640	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.048.408.400	
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.408.400	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.000.000.000	
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.366.726.240	
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.000.000.000	
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	156.567.700	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	780.000.000	
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.401.688.100	
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	28.470.440	
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.851.116.120	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.851.116.120	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.851.116.120	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.065.152.120	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.686.052.120	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.036.556.120	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.496.000	
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.600.000	
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.600.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.346.200	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.587.600	
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.210.000	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.364.095	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.000.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520.184.505	
2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.000.000	
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.000.000	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.951.064.000	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	325.000.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.560.064.000	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.089.800	
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.319.800	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.770.000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	104.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.000.000	
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.000.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	104.000.000	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.000.000	
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	104.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.419.964.000	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.249.937.650	
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.249.937.650	
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.170.026.350	
2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.170.026.350	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	714.000.000	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	714.000.000	
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	610.000.000	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	104.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.700.000.000	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.700.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.700.000.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.744.000.000	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	3.744.000.000	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.744.000.000	
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	16.110.063.554	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16.110.063.554	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16.110.063.554	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.659.459.809	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.016.000	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.396.032	
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.420.000	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.199.968	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.368.983.554	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.820.403.554	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548.580.000	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.220.000	
2.18.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29.220.000	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.444.200	
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.352.200	
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.092.000	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.583.577	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.167.691	
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.809.846	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	217.926.000	
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.850.000	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.200.000	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.630.040	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	983.703.152	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	484.095.000	
2.18.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.608.152	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.410.040.826	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.948.192	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.746.250	
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.000.000	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.057.346.384	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.468.500	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.712.500	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.756.000	
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.000.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	262.140.000	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	154.200.000	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	154.200.000	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	107.940.000	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	107.940.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	362.207.000	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	362.207.000	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	277.585.000	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	84.622.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	743.932.820	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	130.840.000	
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	130.840.000	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	613.092.820	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	246.720.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	43.668.900	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	261.023.920	
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	61.680.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	942.887.925	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	942.887.925	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	636.062.925	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	306.825.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	139.436.000	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	139.436.000	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	139.436.000	
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	37.355.842.201	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	37.355.842.201	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	37.355.842.201	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.369.044.191	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.964.380	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.991.000	
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.973.380	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.255.437.611	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.177.866.611	
2.19.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.066.776.000	
2.19.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.795.000	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	270.000.000	
2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.447.200	
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.985.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.420.000	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	386.822.200	
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.200.000	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.020.000	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.293.849.000	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156.000.000	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.064.000	
2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.835.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.704.950.000	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.346.000	
2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.910.000	
2.19.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	579.436.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.518.210.200	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.518.210.200	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	30.000.000	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.028.034.800	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.000.000.000	
2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	331.762.000	
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	128.413.400	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	15.440.555.210	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5.277.955.210	
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.318.000.000	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	2.959.955.210	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.680.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	2.680.000.000	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	60.000.000	
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	30.000.000	
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	30.000.000	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	7.422.600.000	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	7.422.600.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.028.032.600	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.028.032.600	
2.19.04.1.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1.028.032.600	
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	115.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	115.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	115.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	115.000.000	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	115.000.000	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	115.000.000	
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	50.000.000	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000	
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.637.494.613	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	16.637.494.613	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	16.637.494.613	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.533.711.637	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.732.468	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.475.300	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136.931.028	
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.326.140	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.505.052.829	
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.952.092.829	
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	552.960.000	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.032.424.700	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.249.000	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.842.800	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	427.397.900	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.700.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	377.235.000	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.010.700	
2.22.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.010.700	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.491.610.748	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.660.144	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.631.508	
2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	907.319.096	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.880.192	
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.350.000	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.910.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.948.192	
2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.672.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.530.347.344	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.895.110.796	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	587.555.248	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.307.555.548	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	635.236.548	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	635.236.548	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.308.112.744	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.308.112.744	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	170.717.996	
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	24.566.400	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.112.828.348	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.508.347.044	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	1.508.347.044	
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	137.555.048	
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	400.000.000	
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	970.791.996	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	586.183.748	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	448.636.300	
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	344.318.200	
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	104.318.100	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	137.547.448	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	137.547.448	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	170.792.096	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	170.792.096	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	170.792.096	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	18.472.048.870	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	18.472.048.870	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	18.272.141.060	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.785.541.060	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.746.848.520	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.341.704.520	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.144.000	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.998.200	
2.23.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.998.200	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.133.840	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.215	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.922.000	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.561.175	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.984.800	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.999.650	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.666.000	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.254.200.000	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	884.000.000	
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.367.200.000	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.360.500	
2.23.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	12.000.000	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.824.000	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.536.500	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.291.600.000	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.121.600.000	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	200.000.000	
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	91.600.000	
2.23.02.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	200.000.000	
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.524.000.000	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	106.000.000	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	170.000.000	
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	170.000.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	195.000.000	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	195.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	139.722.900	
2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	55.277.100	
2.23.2.24.0.00.02.000 1	UPT PERPUSTAKAAN	199.907.810	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	199.907.810	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.967.610	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.722.000	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.729.300	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.369.710	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.102.600	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.752.000	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.292.000	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.982.200	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.582.200	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.958.000	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.920.000	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.038.000	
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	729.999.650	
2.23.2.24.0.00.02.000 0	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	729.999.650	
2.23.2.24.0.00.02.000 0	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	729.999.650	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	604.999.800	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	149.999.800	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10.000.000	
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	139.999.800	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	165.000.000	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	165.000.000	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	290.000.000	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	10.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	280.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	124.999.850	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	124.999.850	
2.24.03.1.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	124.999.850	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.673.475.599	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	53.673.475.599	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	46.369.719.217	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.355.365.237	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.004.918	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	98.509.320	
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.373.598	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.122.000	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.198.580.647	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.859.206.647	
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.339.374.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.179.663.800	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	835.778.600	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.589.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.835.200	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.585.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	280.440.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.870.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.728.000	
3.25.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.838.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.276.375.872	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.331.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.232.044.872	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.740.000	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	378.340.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	200.294.100	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	180.294.600	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	180.294.600	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	19.999.500	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	19.999.500	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.567.869.970	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	9.231.657.856	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	32.381.000	
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	9.199.276.856	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	127.717.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	127.717.000	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	208.495.114	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	208.495.114	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.846.011.700	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.999.050	
3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	149.999.050	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	6.696.012.650	
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.687.000	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3.081.798.970	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.684.297.990	
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.938.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.1.05.08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.899.290.690	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	205.002.600	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	205.002.600	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	205.002.600	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.195.175.610	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	469.571.960	
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	236.561.700	
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	233.010.260	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	312.956.650	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	312.956.650	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	412.647.000	
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	412.647.000	
3.25.0.00.0.00.01.000 1	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS	304.158.492	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	215.749.444	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.827.200	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.827.200	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.922.244	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.499.956	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.422.288	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	88.409.048	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	88.409.048	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	88.409.048	
3.25.0.00.0.00.01.000 2	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA	672.064.334	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	672.064.334	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.806.410	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.806.410	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.257.924	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.072.684	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.185.240	
3.25.0.00.0.00.01.000 3	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA	480.142.640	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	474.145.640	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.335.240	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.335.240	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.810.400	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.810.400	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.997.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	5.997.000	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	5.997.000	
3.25.0.00.0.00.01.000 4	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN	1.202.202.220	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.052.202.220	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.998.900	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.998.900	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.203.320	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.997.600	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.006.205.720	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	150.000.000	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	150.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.000 5	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	1.049.765.448	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	989.765.448	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.000.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.500.000	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.500.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.265.448	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.578.400	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.687.048	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	40.000.000	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	40.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD BALAI BENIH IKAN	1.963.079.600	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.314.325.200	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83.200.000	
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	83.200.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.885.200	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.685.200	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894.200.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.240.000	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.240.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	648.754.400	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	648.754.400	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	527.994.400	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	120.760.000	
3.25.0.00.0.00.01.0007	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	690.848.384	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	685.848.384	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570,000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	570.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.278.384	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.682.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576.596.384	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	5.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.0008	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	941.495.264	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	931.498.864	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.800.000	
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.800.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.098.864	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.998.864	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.100.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.600.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.600.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.996.400	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	9.996.400	
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	9.996.400	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	24.099.259.555	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	24.099.259.555	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	24.099.259.555	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.228.267.363	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.713.000	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.665.500	
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.621.500	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.452.117.363	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.591.281.363	
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	835.836.000	
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	771.011.869	
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.425.200	
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.173.800	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.412.869	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.990.000	
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.990.000	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.356.002.131	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.800.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.252.702.131	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.146.000	
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.780.000	
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.576.000	
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.790.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.850.000.000	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	175.000.000	
3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	175.000.000	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.310.000.000	
3.26.02.1.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	175.000.000	
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.135.000.000	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	175.000.000	
3.26.02.1.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	175.000.000	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	190.000.000	
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	55.000.000	
3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	135.000.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	9.236.992.192	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	9.236.992.192	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	7.753.000.000	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	960.000.000	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	523.992.192	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	284.000.000	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	125.000.000	
3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	125.000.000	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	159.000.000	
3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	109.000.000	
3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50.000.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	500.000.000	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	300.000.000	
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100.000.000	
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200.000.000	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	200.000.000	
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000	
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	100.000.000	
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.958.002.336	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	8.958.002.336	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	7.092.500.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.606.000.000	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.406.000.000	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.406.000.000	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.200.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.200.000.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.970.000.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1.970.000.000	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.970.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	200.000.000	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	200.000.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	316.500.000	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	316.500.000	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	316.500.000	
2.09.3.27.0.00.02.000 1	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN	866.192.000	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	316.192.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.991.600	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.991.600	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.170.400	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.170.400	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.030.000	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.140.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.890.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	500.000.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	500.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	500.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50.000.000	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	50.000.000	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000.000	
2.09.3.27.0.00.02.000 2	UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	999.310.336	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	440.310.336	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.129.600	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.257.100	
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.994.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.994.500	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.984.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.180.736	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.181.636	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.249.100	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.750.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	559.000.000	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	559.000.000	
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	31.312.000	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	370.606.000	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	157.082.000	
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	332.291.900	
2.11.3.28.0.00.02.000 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	332.291.900	
2.11.3.28.0.00.02.000 2	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN	48.117.800	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	48.117.800	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	48.117.800	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	48.117.800	
2.11.3.28.0.00.02.000 3	UPTD KPHP UNIT III LINGGA	48.922.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	48.922.000	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	48.922.000	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	48.922.000	
2.11.3.28.0.00.02.000 4	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG	70.881.900	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	70.881.900	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	70.881.900	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	70.881.900	
2.11.3.28.0.00.02.000 5	UPTD KPHP UNIT V NATUNA	53.494.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	53.494.000	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	53.494.000	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	53.494.000	
2.11.3.28.0.00.02.000 6	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS	80.563.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	80.563.000	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	80.563.000	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	80.563.000	
2.11.3.28.0.00.02.000 7	UPTD KPHL UNIT II BATAM	30.313.200	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	30.313.200	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	30.313.200	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	30.313.200	
3,29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	24.291.193.657	
3.29.0.00.0.00.01.000 0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24.291.193.657	
3.29.0.00.0.00.01.000 0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24.291.193.657	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.586.015.889	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.726.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136.726.000	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.936.543.657	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.367.993.657	
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.700.000	
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	157.850.000	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.701.000	
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.800.000	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.901.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	644.917.232	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.760.600	
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.724.432	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.678.200	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.754.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.361.200.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.361.200.000	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.928.000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.430.000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.070.000	
3.29.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000	
3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.428.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	249.999.800	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100.000.000	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	100.000.000	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	149.999.800	
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	74.999.800	
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	75.000.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	2.555.152.618	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	2.555.152.618	
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	105.153.000	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	2.199.999.618	
3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	150.000.000	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	100.000.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	8.900.025.350	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16.940.000	
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16.940.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	104.845.000	
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	54.845.000	
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	65.715.000	
3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	37.500.000	
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	28.215.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	8.712.525.350	
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2.150.004.000	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum	71.780.350	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.431.719.000	
3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	59.022.000	
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	17.288.415.136	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.288.415.136	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.288.415.136	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.128.476.659	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.410.890.251	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.986.330.251	
3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	424.560.000	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.297.566.100	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.918.200	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.676.900	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.040.000	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.088.931.000	
3.30.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	54.000.000	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.878.240.308	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.800.000	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.690.440.308	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.780.000	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.350.000	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.030.000	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.400.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	860.000.000	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	860.000.000	
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	860.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.649.938.737	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.649.938.737	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.100	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.599.938.637	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	149.999.740	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	149.999.740	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.000.000	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	49.999.740	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	500.000.000	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	450.000.000	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	50.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.925.989.543	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.925.989.543	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.925.989.543	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.825.999.943	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.825.999.943	
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	55.771.700	
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.228.200	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.000.000.043	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	570.000.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	99.989.600	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	99.989.600	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.989.600	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	50.000.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	270.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	270.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	270.000.000	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.000.000	
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	10.000.000	
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	10.000.000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.000.000	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000	
3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	250.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	250.000.000	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	250.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	359.843.797.118	
4.01.5.06.5.07.01.0000	Sekretariat Daerah	359.843.797.118	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Kesejahteraan Rakyat	116.353.512.640	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.659.954.460	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.448.500	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.448.500	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.436.800	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.436.800	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	552.859.700	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.721.300	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.138.400	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	414.300.100	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	264.401.500	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.898.600	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.424.016.160	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	283.955.200	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.020.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.073.040.960	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.893.200	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.893.200	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	113.693.558.180	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	106.442.655.880	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	82.708.315.980	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	23.734.339.900	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	7.021.612.300	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	6.793.565.300	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	151.617.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	76.430.000	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	229.290.000	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	76.430.000	
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	76.430.000	
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	76.430.000	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Administrasi Perekonomian	3.418.450.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.571.653.460	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.737.650	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.737.650	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.100.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.720.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.380.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.258.702.570	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.549.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	191.681.370	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.776.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	986.696.200	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.963.100	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	61.411.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.552.100	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697.250.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.200.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.050.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.900.140	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.400.140	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	846.796.540	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	408.147.940	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	63.159.340	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	344.988.600	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	193.402.800	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	63.151.320	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	67.659.940	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	62.591.540	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	245.245.800	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	69.341.380	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	113.349.440	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	62.554.980	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Pengadaan Barang/Jasa	3.798.700.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.214.497.500	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.650.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.650.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.037.398.490	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.400	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.337.400	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.824.100	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.100.590	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.560.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665.577.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.723.090.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.590.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.800.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.646.700.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.359.010	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.630.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.780.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.254.610	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.694.400	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	584.202.500	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	231.768.800	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	50.000.000	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	131.768.800	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	152.433.700	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	52.433.700	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.0.00.0.00.01.0006	Biro Administrasi Pembangunan	3.138.150.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.916.011.750	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.407.150	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.105.950	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.026.600	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.274.600	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.636.600	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.935.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.701.600	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	899.303.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.912.500	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.393.500	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	706.997.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.491.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.491.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.300.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	568.300.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.874.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.874.000	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.222.138.250	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	852.138.350	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	409.994.700	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	140.000.000	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	302.143.650	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	369.999.900	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	90.000.000	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	89.999.900	
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	190.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Biro Organisasi dan Korpri	2.936.322.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.846.322.000	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.372.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.372.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.686.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.686.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.809.600	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.718.280	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.981.045	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	704.710.275	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.100.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.100.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.950.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	625.950.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.404.400	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.404.400	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.090.000.000	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	297.616.000	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	192.616.000	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	30.000.000	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	75.000.000	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	792.384.000	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	267.916.000	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	30.000.000	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	150.000.000	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	244.468.000	
4.01.0.00.0.00.01.001 1	Biro Hukum	3.409.850.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.038.311.000	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.275.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.275.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.036.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.506.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.530.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.371.539.000	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.659.139.000	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	895.239.000	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	221.900.000	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	214.800.000	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	327.200.000	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	712.400.000	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	260.000.000	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	452.400.000	
4.01.5.06.5.07.01.000 1	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	4.180.086.200	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.044.588.500	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.072.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.072.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.630.116.700	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.116.650	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.382.800	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.514.250	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	188.960.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.335.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.195.808.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341.479.800	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	279.769.200	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.710.600	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.840.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.000.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.080.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.140.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.135.497.700	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	378.499.500	
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	48.499.500	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	240.000.000	
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	90.000.000	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	378.499.300	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	48.499.300	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	100.000.000	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	230.000.000	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	378.498.900	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	188.499.500	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	94.999.400	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	95.000.000	
4.01.5.06.5.07.01.0009	Biro Humas Protokol dan Penghubung	32.532.442.830	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.510.382.830	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.431.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.431.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.067.873.340	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.137.252.240	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.290.591.100	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.040.030.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.400.000.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.785.900	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	319.785.900	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.503.875.500	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	501.841.500	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.736.034.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.498.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	560.000.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.498.000	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	14.498.471.310	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	274.643.600	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	13.846.827.710	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	377.000.000	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	3.155.447.780	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.669.672.900	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	501.595.496	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	984.179.384	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	22.060.000	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	22.060.000	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	22.060.000	
4.01.5.06.5.07.01.001 2	Biro Umum	190.076.283.448	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	190.076.283.448	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.575.500	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.575.500	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.626.673.955	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.508.850.455	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.309.644.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	308.833.500	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	175.179.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	155.010.500	
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	60.189.500	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108.967.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.529.709.500	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	52.887.000	
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	608.332.000	
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	170.274.500	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.439.000	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	652.777.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	924.931.600	
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	102.409.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	400.100.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47.079.500	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.500.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	215.656.500	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	107.186.600	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.380.220.711	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.826.398.336	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	705.540.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.616.349.200	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	322.847.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.658.100	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.923.290.875	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.553.976.500	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	314.284.500	
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	38.876.200	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.544.017.780	
4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.436.908.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.528.200.280	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	578.909.500	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.846.380.901	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	718.115.200	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.811.355.799	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.725.207.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.591.702.902	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.112.758.351	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	624.918.900	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.509.239.917	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	194.935.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.107.227.525	
4.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	742.611.325	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.933.825.684	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.631.954.850	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	315.000.000	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	176.249.850	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140.705.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.000.000.000	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.412.329.200	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.168.353.360	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.454.091.940	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.789.883.900	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	994.731.100	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	994.731.100	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	158.967.000.000	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	158.967.000.000	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	158.967.000.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.657.298.000	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	558.657.800	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.657.800	
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	110.000.000	
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	110.000.000	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.908.867.104	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.818.131.104	
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	767.736.000	
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.500.000	
4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	110.000.000	
4.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	97.500.000	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000.000	
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.777.176.596	
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.863.500	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.083.399.096	
4.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000.000	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.914.000	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.903.840.000	
4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	23.880.000	
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.340.000	
4.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.850.100.000	
4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.475.520.000	
4.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.000.000	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.968.460.000	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.531.360.000	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.437.100.000	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.630.096.500	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.957.520.000	
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.170.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	266.647.500	
4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.223.759.000	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.565.000.000	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	65.000.000	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	750.000.000	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	750.000.000	
4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	645.200.000	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	645.200.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	71.309.702.000	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.320.600.000	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	500.000.000	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	500.000.000	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	220.600.000	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	100.000.000	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	400.200.000	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	400.200.000	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	8.044.000.000	
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.650.000.000	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	350.000.000	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	540.000.000	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	2.004.000.000	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.500.000.000	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	29.556.400.000	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.356.400.000	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200.000.000	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	28.000.000.000	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	31.988.502.000	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	31.242.102.000	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	234.400.000	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	282.000.000	
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	230.000.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5,01	PERENCANAAN	32.937.448.159	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.937.448.159	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.937.448.159	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.234.201.259	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.199.522.945	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.093.082.945	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	856.440.000	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.898.200	
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	74.686.200	
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.344.200	
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.406.200	
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.665.200	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000	
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.004.870.000	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.388.000	
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	439.482.000	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.539.851.450	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.378.000	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.892.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.467.000	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	325.000.000	
5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.761.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.353.450	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.000.000	
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	125.000.000	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.011.196.864	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.040.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.000.000	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.581.156.864	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.760.000	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.560.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.200.000	
5.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.246.551.300	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.830.652.300	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	307.071.900	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	209.632.100	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.300.400	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.000.000.000	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	268.647.900	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	738.323.100	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	276.786.900	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	161.536.200	
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	300.000.000	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	677.575.900	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	192.811.000	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	222.575.900	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	187.189.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.456.695.600	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.657.424.200	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	166.404.100	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	228.353.000	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	135.570.000	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	439.000.000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	151.000.000	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	187.620.800	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	126.000.000	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	223.476.300	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.480.271.400	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	174.637.500	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	96.378.500	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	164.334.400	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	438.921.000	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	220.700.000	
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	120.000.000	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	165.300.000	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.319.000.000	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	641.000.000	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	439.500.000	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	595.700.000	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	642.800.000	
5,02	KEUANGAN	820.851.236.046	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	708.891.236.046	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	706.527.875.054	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99.244.416.448	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	629.652.900	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	169.652.900	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.923.720.889	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.437.003.483	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.211.717.406	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	200.000.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.991.250	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.991.250	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.587.708.856	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.723.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.630.980	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.696.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.320.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	164.843.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.071.400	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	557.424.476	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	967.600.457	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	258.586.248	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	503.210.784	
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.826.425	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.977.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.809.050.096	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.274.096	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.302.776.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.692.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	623.952.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.100.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.640.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	605.483.458.606	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.295.581.568	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	550.000.000	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	500.000.000	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	350.000.000	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	300.000.000	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	350.000.000	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	300.000.000	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	550.000.000	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	500.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	450.000.000	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	450.000.000	
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	995.581.568	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	684.323.792	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	230.780.000	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	254.000.000	
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	199.543.792	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	682.968.192	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	282.968.192	
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100.000.000	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	75.000.000	
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	225.000.000	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.720.000.000	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	670.000.000	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	450.000.000	
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	450.000.000	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	596.212.585.054	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	25.200.000.000	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.000.000.000	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	541.012.585.054	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	888.000.000	
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	352.000.000	
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	536.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.800.000.000	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.800.000.000	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	389.406.000	
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	153.874.000	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	609.840.000	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	383.993.000	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	262.887.000	
5.02.0.00.0.00.02.000 1	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET	1.817.777.800	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.817.777.800	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.091.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.319.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.512.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.360.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.991.800	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.065.600	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.926.200	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.695.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.695.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.000.000	
5.02.0.00.0.00.02.0002	UPT DANA BERGULIR	545.583.192	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274.097.792	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.149.600	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.704.800	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.788.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.056.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.948.192	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	137.948.192	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	271.485.400	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	13.282.800	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13.282.800	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	258.202.600	
5.02.02.1.05.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	258.202.600	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	111.960.000.000	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	100.982.662.338	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	93.172.644.658	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	237.034.500	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.570.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.464.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.000.500	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.213.620.322	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.156.082.801	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.012.354.521	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.183.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.887.400	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.887.400	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	630.926.600	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	386.839.600	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	244.087.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	449.671.000	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	181.955.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225.716.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.488.861.410	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.697.400	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.440.913.000	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	101.475.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.488.510	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.444.311.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.984.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.580.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	971.412.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	751.162.400	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	701.162.400	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.746.675.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.701.925.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.944.250.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.601.806.026	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.096.783.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	419.720.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.085.303.026	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	801.466.600	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	300.000.000	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	300.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	351.466.600	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	351.466.600	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	150.000.000	
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.008.551.080	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.008.551.080	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.294.684.300	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	824.036.500	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.449.227.100	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.019.168.580	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	773.152.100	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	250.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	879.812.000	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	105.896.500	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	112.574.000	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	300.000.000	
5.02.0.00.0.00.03.000 1	UPT PPD BATAM CENTRE	3.032.891.350	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	911.779.100	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.894.300	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.029.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.233.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	278.081.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.550.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.512.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.512.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.372.800	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.174.800	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.198.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.121.112.250	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.121.112.250	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.304.148.250	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	487.750.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	329.214.000	
5.02.0.00.0.00.03.000 2	UPT PPD Tanjungpinang	1.717.864.472	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	802.631.672	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.273.200	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.652.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.635.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.436.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.550.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.425.472	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.675.472	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.933.000	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.090.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.843.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	915.232.800	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	915.232.800	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	159.640.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	550.000.300	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	205.592.500	
5.02.0.00.0.00.03.000 3	UPT PPD BINTAN	1.010.468.096	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	610.468.096	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.035.346	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.102.200	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.212.546	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.212.600	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.135.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.368.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.822.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.183.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.872.750	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.872.750	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.560.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.330.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.930.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.300.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	145.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	105.000.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150.000.000	
5.02.0.00.0.00.03.0004	UPT PPD KARIMUN	1.156.460.294	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	807.848.294	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.700.900	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.907.400	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.855.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.918.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.075.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.945.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.336.250	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.260.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.076.250	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.811.144	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.220.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.600.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.991.144	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	348.612.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	348.612.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	99.999.900	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	148.612.100	
5.02.0.00.0.00.03.0005	UPT PPD LINGGA	1.019.620.410	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	545.732.410	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.548.410	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.895.500	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.091.210	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.559.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.098.400	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.904.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.172.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.172.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.012.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.200.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.812.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	473.888.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.888.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	118.300.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	166.600.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	188.988.000	
5.02.0.00.0.00.03.000 6	UPT PPD NATUNA	1.025.183.100	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	570.187.600	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.007.600	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.584.900	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.234.800	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.876.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.175.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.136.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.560.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.560.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.620.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.340.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.080.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.200.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	454.995.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	454.995.500	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	145.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	124.995.600	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	184.999.900	
5.02.0.00.0.00.03.000 7	UPT PPD ANAMBAS	392.676.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	286.576.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.320.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.795.400	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.398.400	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.650.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.803.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.840.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.633.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.536.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.036.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.720.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.280.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.320.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	106.100.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	106.100.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	36.200.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	69.900.000	
5.02.0.00.0.00.03.0008	UPT PPD BATU AJI	685.367.600	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	514.910.900	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.990.900	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.438.000	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.132.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.630.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.508.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.632.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.610.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.040.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.310.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.560.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.610.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.630.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.980.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	170.456.700	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	170.456.700	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9.900.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	60.989.700	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	99.567.000	
5.02.0.00.0.00.03.0009	UPT PPD KIJANG	526.806.600	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	323.510.600	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.896.600	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.495.200	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.286.400	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.605.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.510.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.000.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.614.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.410.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.204.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	203.296.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	203.296.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	47.740.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	58.036.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	97.520.000	
5.02.0.00.0.00.03.0010	UPT PPD TANJUNG BATU	409.999.740	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	318.873.340	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.569.340	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.600	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.700	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.909.840	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.396.200	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.454.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.558.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.186.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.686.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.118.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.990.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.128.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	91.126.400	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	91.126.400	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	41.391.400	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49.735.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	25.745.091.688	
5.04.5.03.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.745.091.688	
5.04.5.03.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.745.091.688	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.515.320.376	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.530.240.988	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.752.040.988	
5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	778.200.000	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.130.503.488	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.779.200	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.232.500	
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.983.600	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.485.238	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.326.000	
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	169.589.050	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.966.900	
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.041.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.100.000	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.650.000	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.660.000	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.780.000	
5.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.033.210.000	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.925.900	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	398.575.900	
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.350.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.229.771.312	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	500.025.800	
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	249.997.000	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.028.800	
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	50.000.000	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	50.000.000	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	699.804.500	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	249.941.000	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	149.863.300	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	300.000.200	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	779.453.462	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	479.678.362	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	199.992.100	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	99.783.000	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	250.487.550	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.406.200	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100.000.000	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	50.081.350	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.085.399.300	
5.04.5.03.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.085.399.300	
5.04.5.03.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.085.399.300	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.085.399.300	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	250.000.000	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	250.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	835.399.300	
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	115.516.100	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	124.660.500	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	141.094.300	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	454.128.400	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.048.824.200	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.048.824.200	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.048.824.200	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	425.000.000	
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.000.000	
5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	425.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.623.824.200	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.385.303.700	
5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	300.000.000	
5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	225.000.000	
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	475.000.000	
5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	385.303.700	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	225.000.000	
5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	225.000.000	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.448.000.000	
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	380.000.000	
5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	600.000.000	
5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	468.000.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	565.520.500	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300.000.000	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	141.906.900	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	123.613.600	
5,06	PENGELOLAAN PERBATASAN	1.133.030.800	
4.01.5.06.5.07.01.0000	Sekretariat Daerah	1.133.030.800	
4.01.5.06.5.07.01.0001	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	1.133.030.800	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.133.030.800	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	240.492.500	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	70.492.800	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	169.999.700	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	696.938.600	
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	344.938.600	
5.06.02.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	24.000.000	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	304.000.000	
5.06.02.1.02.04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	24.000.000	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	195.599.700	
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	149.999.700	
5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	24.000.000	
5.06.02.1.03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	
5,07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	645.857.168	
4.01.5.06.5.07.01.0000	Sekretariat Daerah	645.857.168	
4.01.5.06.5.07.01.0009	Biro Humas Protokol dan Penghubung	645.857.168	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	645.857.168	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	645.857.168	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	171.704.700	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	61.464.000	
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	412.688.468	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	29.858.674.747	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	29.858.674.747	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	29.858.674.747	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.299.365.347	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.227.700	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.426.200	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.801.500	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.272.535.107	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.855.871.107	
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	416.664.000	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	496.042.000	
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.880.000	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	421.162.000	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.738.296.540	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.011.000	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	538.155.720	
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.800.000	
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	486.313.480	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	303.575.100	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.288.441.240	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.000.000	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.000.000	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.075.264.000	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	790.970.000	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.190.000	
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.104.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.923.139.596	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.981.549.648	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	535.214.548	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	647.846.500	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	37.546.200	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	127.159.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	113.797.600	
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.250.000.000	
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	269.985.800	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	941.589.948	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	35.050.000	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	906.539.948	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.636.169.804	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.040.612.156	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	315.073.048	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	725.539.108	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	595.557.648	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	163.799.048	
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	81.665.000	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	139.778.000	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	210.315.600	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.580.021.683	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.580.021.683	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.580.021.683	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.861.587.183	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.686.900	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.531.900	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91.155.000	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.901.588.422	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.258.688.422	
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	642.900.000	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.511.837	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.775.700	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.664.137	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.370.000	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	887.702.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.032.000	
8.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.032.000	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.564.728.024	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.446.000	
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.800.400	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.417.481.624	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.040.000	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.040.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	559.967.800	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	559.967.800	
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	60.791.300	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	349.800.500	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	149.376.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.929.431.400	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.929.431.400	
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,	124.079.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	70.000.000	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.735.352.400	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.729.928.500	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.729.928.500	
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150.063.200	
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	144.865.300	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.435.000.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	591.306.200	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	591.306.200	
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	130.000.000	
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	110.998.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.308.200	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	15.907.800.600	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	15.907.800.600	
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	99.085.700	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	86.326.900	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13.750.000.000	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280.290.000	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.692.098.000	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.129.941.596.804
2	Belanja Barang dan Jasa	1.397.037.002.113
3	Belanja Hibah	283.652.601.833
4	Belanja Bantuan Sosial	960.223.500
5	BELANJA MODAL	462.519.071.205
	Belanja Modal Tanah	1.900.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.944.079.526
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.869.018.010
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	179.862.658.040
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.943.315.629
6	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	541.012.585.054
8	Belanja Bantuan Keuangan	25.200.000.000
	TOTAL	3.870.323.080.509

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah dengan total mencapai Rp390.000.000.000,00. Diperkirakan SiLPA tahun 2022 mencapai Rp 210.000.000.000,00 dan Penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 180.000.000.000,00.

2.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	180.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	390.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	390.000.000.000

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 903/2301/SETWAN-SET/2021
06/160/MOU-DPRD/XI/2021
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2021
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE, MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri
Gedung A Pulau Dompok Tanjungpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2. a. Nama : Jumaga Nadeak, SH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
b. Nama : Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
c. Nama : Raden Hari Tjahyono
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau

beralamat yang sama di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompok, Tanjungpinang.

Sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tanjungpinang, 11 November 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ANSAR AHMAD, SE, MM

PIMPINAN DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

JUMARA NADEAK, SH
KETUA


Dra. Hj. DEWI KUMALASARI, M.Pd
WAKIL KETUA

RADEN HARI TJAHYONO
WAKIL KETUA

dr. T. AFRIZAL DACHLAN
WAKIL KETUA

